

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demi mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah akan selalu melakukan terobosan dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan baru agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pusat maupun daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) muncul sebagai kebijakan yang diambil pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pedoman serta petunjuk dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Akuntansi memiliki banyak peran yang sangat penting dalam sebuah instansi karena akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan atau laporan keuangan yang relevan (Sucahyo, 2017 : 01), maka dari itu setiap instansi di Indonesia harus melakukan pembukuan transaksi akuntansi yang akurat dan mudah dipahami terutama transaksi pengelolaan kas. Kas merupakan aset yang paling penting dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan operasi maupun aktivitas instansi, karena kas merupakan alat pembayaran yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban dalam sebuah instansi (Dewi, 2015 : 2), sehingga kelancaran pelaksanaan

operasional maupun aktivitas sangat dipengaruhi oleh besar maupun kecilnya kas yang tersedia dalam suatu instansi.

Menurut Puspita, 2015 : hal 3 sistem informasi akuntansi juga mempunyai peran yang sangat besar bagi sebuah instansi. Salah satunya sistem informasi akuntansi yang digunakan adalah penerimaan dan pengeluaran kas. Karena dengan adanya sistem tersebut dapat mengurangi penyelewengan kas atau aset yang dilakukan pihak internal. Salah satu jenis sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk mengendalikan dan mengawasi keluarnya kas harus sesuai dengan anggaran yang dibuat dan tidak mengalami kelebihan pengeluaran kas maka dari itu sistem pengeluaran sangatlah penting bagi sebuah instansi.

Keberadaan sistem informasi akuntansi yang benar dalam sebuah instansi, akan membuat manajemen tersebut dapat mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan operasi apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan (efisien dan efektif). Disamping itu sistem informasi akuntansi dapat digunakan dalam penugasan dan wewenang sebagai pedoman bagi sumber daya manusia yang bekerja dalam instansi tersebut, sehingga dapat berjalan sesuai prosedur yang ada. Memperoleh informasi yang sangat dibutuhkan dalam sebuah instansi bisa diperoleh dengan cepat, tepat waktu, akurat, dan relevan disebabkan oleh adanya sistem informasi akuntansi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31

ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/ kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), dan Akuntansi belanja Langsung (LS). Agar pengelolaan keuangan dapat memenuhi asas tertib, ekonomis, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan komprehensif maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, dan salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum, sehingga dapat diperbandingkan, dan tidak menyesatkan.

Pengeluaran kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah, pemerintah haruslah berhati-hati dalam melakukan aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan

pengeluaran kas, artinya setiap penerimaan ataupun pengeluaran kas yang dilakukan harus diperhitungkan manfaat dan keuntungan yang akan didapat. Pengeluaran kas merupakan kegiatan yang mana sering dilakukan untuk transaksi pembayaran. Termasuk pengeluaran kas adalah pembayaran kepada pihak lain dengan penyerahan uang tunai, penyerahan cek, transfer kas antar bank termasuk transfer melalui fasilitas ATM.

Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang efektif, khususnya dalam pengeluaran kas perlu adanya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal pemerintah adalah sistem pengendalian yang diselenggarakan menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adanya sistem pengendalian internal bertujuan untuk menghindari segala bentuk penyelewengan, penyalahgunaan, penggelapan, serta pemborosan harta kekayaan negara terhadap kas dan guna memperbaiki adanya kesalahan dan penyelewengan yang terjadi dan dapat mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal tersebut.

Sistem pengeluaran kas digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Penatausahaan pengeluaran kas merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan

Daerah) dan/ atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Mengelola keuangan dan aset daerah perlu adanya pengawasan intern yang memadai, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan.

Sistem pengendalian internal meliputi berbagai kebijakan terkait dengan catatan keuangan, memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah yang telah ditentukan pada setiap instansi, penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otoritas yang memadai, dan memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan Pemerintah. Sehingga jika tidak terlaksana pengendalian internal dengan baik maka akan mudah terjadi penggelapan. Pengendalian internal yang baik dapat diciptakan dengan peran Pemerintah dalam menetapkan pertanggungjawaban secara jelas dan masing-masing orang memiliki tanggung jawab untuk tugas dan kewajiban yang diberikan padanya.

Peneliti mengenai pengendalian internal ini telah banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian Tarigan, Warongan (2016) menemukan bahwa Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada BPPKP Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah ditetapkan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal yang perlu diperhatikan oleh BPPKP Kota Manado yaitu meningkatkan dan mempertahankan Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran

Kas yang dilaksanakan oleh BPPKP. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Panambunan dan Tinangon (2016) yaitu pengendalian internal dalam penerapan system dan prosedur pengeluaran kas di Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara telah sesuai dengan aturan. Sebaiknya kinerja dan disiplin Sumber Daya Manusia di Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara terus dipertahankan dan diterapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rorong, Karamoy, Pangemanan (2018) menemukan bahwa Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Penggajian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah ditetapkan, karena informasi dan data yang ada dapat dipertanggungjawabkan secara administrative dan dapat diterima secara umum karena adanya dokumen-dokumen dan bukti transaksi seperti: Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Gaji dan Tunjangan, Surat Permintaan Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Nota Pencairan Dana (NPD). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Meilisa, Sondakh, Tinangon (2019) menemukan bahwa Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Uang Persediaan (UP) untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada SKPD, kepada penggunaan anggaran pada awal tahun Anggaran diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Uang Persediaan adalah sejumlah

uang tunai yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan Operasional sehari-hari. Penelitian yang dilakukan Panambunan, Tinangon (2016) menemukan bahwa Hasil penelitian ini bahwa system pengendalian intern pengeluaran kas yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri dari lima 5 unsure Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada PP no 60 tahun 2008 seperti lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan.

Penelitian ini mengambil objek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun yang merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang jasa, unsur pelaksana teknis yang berada dibawah Pemerintah Kota Madiun dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Madiun. Sebagai salah satu lembaga teknis daerah dan memiliki tanggung jawab membantu Kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang sebagai pemenuhan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur Kota Madiun. Masalah yang sering terjadi pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Madiun ini berkaitan dengan pengendalian internal sistem pengeluaran kas pada setiap penganggaran yang dilakukan tiap bulannya sering tidak sesuai dengan rincian kas (RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)) yang sudah ditetapkan diawal penganggaran setiap tahunnya, sehingga akan sulit untuk mencairkan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran, penggunaan biaya yang tidak rill, misalkan

seperti pegawai yang mendapat perintah tugas luar (perjalanan dinas) yang tidak melakukan perjalanan namun menerima pencairan dana anggaran perjalanan dinas tersebut. Sehingga dalam permasalahan ini dibutuhkan pengendalian internal yang memadai.

Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus dapat mengendalikan dengan baik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun memerlukan laporan keuangan yang baik dan dapat diandalkan, maka dari itu perludanya sistem informasi akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, cepat, dan dapat diandalkan untuk mengambil keputusan serta kebijakan lainnya di dalam pengendalian lembaga dan ditanggungjawabnya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir (TA) dengan judul **“Evaluasi Pengendalian Internal Dalam Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.**

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana evaluasi pengendalian internal dalam pelaksanaan sistem pengeluaran kas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi ruang lingkup agar tidak terlalu meluas, sehingga dalam pencapaian tujuan yang diharapkan lebih efektif dan peneliti hanya berfokus pada evaluasi

pengendalian internal yang telah diterapkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dalam pelaksanaan sistem pengeluaran kas.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal dalam pelaksanaan sistem pengeluaran kas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota madiun sudah berjalan secara efektif atau belum.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1. Bagi Universitas

Untuk dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dan juga sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang pengendalian internal dalam pelaksanaan sistem pengeluaran kas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.

1.5.2. Bagi Instansi

Diharapkan sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki pengendalian internal dalam pelaksanaan sistem pengeluaran kas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.

1.5.3. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan informasi dalam penelitian ini mengenai pengendalian internal terhadap pengeluaran kas.

1.5.4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.